
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Luthfiah Hanifah ^{1*)}; Januri ²⁾; Zulia Hanum ³⁾

1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: lutfiahhanifah2206@gmail.com

2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: januri@umsu.ac.id

3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: zuliahanum@umsu.ac.id

*Corresponding email: lutfiahhanifah2206@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of accountability and transparency on budget management performance at the Regional Development Planning, Research, and Development Agency of North Sumatra Province. In particular, the research examines how the effectiveness of the Regional Government Information System functions as a moderating variable that can strengthen the relationship between the independent variables and the dependent variable. To achieve this objective, the study adopts a quantitative associative research design, which is appropriate for identifying causal relationships between variables. The analysis is conducted using moderation regression techniques, allowing the researcher to test both the direct effects of accountability and transparency on budget management performance, as well as the interaction effects when moderated by Regional Government Information System. This methodological approach provides a comprehensive understanding of whether and how digital governance systems enhance the impact of accountability and transparency on improving budgetary outcomes within the public sector. The research findings indicate that accountability has a positive and significant effect on budget management performance. The results of the study show that accountability has a significant and positive effect on budget management performance, which means that an increase in accountability will significantly improve performance. Transparency is also proven to have a significant and positive effect on budget management performance, indicating that the higher the level of transparency, the better the budget management performance. In addition, the moderation test results show that SiPD strengthens the influence of both accountability and transparency on budget management performance.

Keyword: *Accountability, Transparency, Budget Management Performance, Regional Government Information System,*

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah merupakan elemen kunci dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam konteks otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan transparansi (Khusaini et al., 2021). Salah satu instansi yang memiliki peran strategis adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran di tingkat provinsi. Efektivitas pengelolaan anggaran pada Bappelitbang menjadi sangat penting karena secara langsung mendukung keberhasilan program pembangunan dan penelitian berbasis inovasi, yang pada gilirannya membutuhkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efisien (Harefa & Bawamenewi, 2022).

Pengelolaan yang efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya memastikan bahwa dana digunakan sesuai prioritas pembangunan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah (Amin et al., 2024).

Di era otonomi daerah yang semakin kompleks, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek krusial, karena keduanya tidak hanya menjamin penggunaan dana publik secara tepat dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan (Nainggolan & Abdullah, 2016). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pihak yang berwenang, sekaligus menjadi indikator integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan, efisien, dan tepat sasaran (Mardiasmo, 2021). Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan yang relevan, dapat diakses, dan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga memungkinkan masyarakat, pemangku kepentingan, serta lembaga pengawas untuk melakukan evaluasi, kontrol, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penggunaan anggaran (Fransisca et al., 2021). Sejalan dengan penelitian Suharyono (2019), akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran, di mana peningkatan akuntabilitas membuat proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi lebih tertib serta mampu meminimalisir penyalahgunaan dana, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas serta profesionalisme pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas yang terjaga dalam pengelolaan anggaran Bappelitbang tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Lubis et al., 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, yang tercermin dari kasus dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN, namun implementasinya terhambat oleh pemblokiran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai Rp 14,87 triliun. Kondisi ini memunculkan perbedaan pernyataan antar pejabat, di mana pihak OIKN menegaskan pembangunan tetap berjalan sesuai fokus pada ekosistem yudisial, legislatif, dan infrastruktur, sementara Menteri PU mengindikasikan adanya keterlambatan progres akibat anggaran terblokir. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem akuntabilitas dan transparansi, karena terdapat ketidaksinkronan informasi antar pemangku kepentingan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, menurunkan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyebut pemblokiran anggaran sebagai hal yang wajar dalam pencairan APBN, namun tetap diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPR RI. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek strategis nasional agar efektivitas pembangunan dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, lemahnya akuntabilitas juga terlihat pada kasus pengelolaan anggaran bantuan sosial (bansos) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda. Meskipun dana besar dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan serius, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, data ganda, hingga warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima (seputarbirokrasi, 2022). Proses pendataan dan penyaluran bansos dinilai kurang transparan dan rawan intervensi politik, bahkan prosedur pengadaan barang

dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa mekanisme yang sesuai regulasi. Minimnya pelibatan masyarakat dan pengawasan independen semakin memperburuk kondisi, sehingga efektivitas dan keadilan penyaluran bantuan tidak tercapai. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan, tujuan pembangunan maupun program sosial sulit diwujudkan secara maksimal, dan risiko penyalahgunaan dana publik akan semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat tercapainya keberlanjutan pembangunan daerah.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan keterbukaan informasi, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau alokasi serta penggunaan dana secara jelas, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (Swandewi & Dewi, 2023). Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, memadai, dan tepat waktu terkait kebijakan maupun pengelolaan anggaran publik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami alur pengambilan keputusan, ikut serta dalam pengawasan, dan menilai sejauh mana anggaran digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan publik (Arifani et al., 2018). Ketersediaan informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat berperan dalam pengawasan sehingga dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan pembangunan (Yulita et al., 2023). Namun, realitas menunjukkan masih adanya praktik yang kurang transparan. Misalnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 terkait penyimpangan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, mulai dari pelaporan fiktif, penggunaan anggaran berlebih, hingga lemahnya sistem pelaporan digital. Hal ini menandakan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi masalah yang krusial dalam pengelolaan anggaran pemerintah, karena tanpa kedua aspek tersebut, potensi penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran program, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akan sulit diminimalkan.

Kondisi yang terjadi di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara menunjukkan beberapa persoalan penting terkait pengelolaan anggaran. Pertama, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk tahun 2024, ketidakpastian kelanjutan proyek hingga 2025 menimbulkan tantangan serius dalam proses perencanaan anggaran. Ketidakpastian ini membuat Bappelitbang sulit menentukan alokasi dana secara tepat, karena tidak ada kepastian apakah proyek akan berlanjut atau tidak. Akibatnya, proses penyusunan anggaran menjadi kurang terarah dan rawan menimbulkan pemborosan. Kedua, kondisi ini memperlihatkan lemahnya akuntabilitas, khususnya dalam evaluasi dan pengawasan. Sistem pengendalian internal yang ada belum mampu memantau dan mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran secara optimal. Meski terdapat perbaikan dalam rasio realisasi anggaran, hal ini belum cukup mencerminkan keberhasilan pengelolaan anggaran secara menyeluruh, karena perencanaan yang dibuat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah. Dengan kata lain, anggaran yang dialokasikan kadang tidak tepat sasaran, sehingga program yang seharusnya mendukung pembangunan secara optimal menjadi terhambat. Ketiga, adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian ini sering menyebabkan keterlambatan proyek atau bahkan proyek tidak terselesaikan sesuai target, sehingga mengurangi manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat. Selain itu, ketidakterpaduan dalam pengelolaan anggaran ini juga menimbulkan risiko rendahnya transparansi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan, situasi ini menekankan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, evaluasi yang sistematis, serta integrasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam konteks ini, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SiPD) menjadi sangat relevan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (Naida, 2024). Dengan memanfaatkan SiPD, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan secara real-time, transparan, dan akuntabel (Dewi et al., 2023). Sistem ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sektor, sehingga perencanaan anggaran lebih tepat sasaran dan memudahkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan. Dengan adanya integrasi tersebut, setiap keputusan anggaran dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan komprehensif, sehingga alokasi dana menjadi lebih efisien dan sesuai prioritas pembangunan. Selain itu, transparansi data yang dihasilkan sistem ini memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk memantau realisasi anggaran secara real-time, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kinerja keuangan daerah. Hal ini secara langsung memperkuat akuntabilitas pemerintah dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Selain itu, SiPD memberikan jejak audit (audit trail) yang memperkuat akuntabilitas, karena setiap alokasi dana dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka (Alfani & Nasution, 2022).

Efektivitas SiPD juga menjadi katalisator dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Adisi & Saddam, 2022). Dengan memanfaatkan fitur-fitur sistem secara optimal, pemerintah daerah dapat menyajikan data anggaran secara lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu, sehingga setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat dipantau dengan jelas. Selain itu, keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh SiPD mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan, sehingga potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir (Ekaputra, 2021). Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran, dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sistem ini menyediakan data real-time yang memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Manoe & Rozady, 2023). Dengan ketersediaan data analitik, pemerintah daerah dapat mengevaluasi apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan prioritas pembangunan, dan melakukan penyesuaian jika ditemukan kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SiPD sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, penerapan teknologi yang tepat, serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan akses informasi sebagai bagian dari pengawasan publik (Deseverians & Wulandari, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif kausal, yang bertujuan menguji hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) serta melihat peran variabel moderasi (Z) dalam memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut (Irfan et al., 2024). Populasi penelitian adalah 100 Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus dijadikan sampel dengan teknik sampel jenuh (Azhari et al., 2023). Data primer diperoleh melalui kuesioner online menggunakan skala ordinal, di mana responden diminta memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang diajukan. Analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS), yang merupakan teknik analisis multivariat untuk menggambarkan hubungan linier antara variabel laten dan indikatornya (Sholiha & Salamah,

2015). PLS sendiri dipilih karena mampu mengestimasi model dengan indikator reflektif maupun normatif, serta sesuai digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel relatif kecil (Fernanda et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dalam SmartPLS dilakukan melalui convergent validity dan construct reliability. Indikator dinyatakan valid jika loading factor $\geq 0,70$ (atau $\geq 0,60$ pada tahap pengembangan) dan AVE $\geq 0,50$, sedangkan reliabilitas konstruk dinilai dari Composite Reliability (CR) $\geq 0,70$. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dikatakan valid dan reliabel apabila memenuhi ketiga kriteria tersebut sesuai standar PLS-SEM.

Tabel 1. Hasil Uji Loading Factor

Variabel	Indikator	Outer Loading
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,810
	X1.2	0,752
	X1.3	0,796
	X1.4	0,821
	X1.5	0,754
	X1.6	0,785
	X1.7	0,798
	X1.8	0,807
	X1.9	0,721
	X1.10	0,808
	X1.11	0,714
	X1.12	0,743
Transparansi (X2)	X2.1	0,790
	X2.2	0,785
	X2.3	0,821
	X2.4	0,737
	X2.5	0,757
	X2.6	0,782
	X2.7	0,753
	X2.8	0,832
	X2.9	0,798
	X2.10	0,741
	X2.11	0,831
	X2.12	0,793
SIPD (Z)	Z1	0,712
	Z2	0,847
	Z3	0,725
	Z4	0,731
	Z5	0,787
	Z6	0,751
	Z7	0,804
	Z8	0,777
	Z9	0,803
	Z10	0,798
	Z11	0,722
	Z12	0,837
	Y1	0,825

Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	Y2	0,782
	Y3	0,820
	Y4	0,788
	Y5	0,857
	Y6	0,737
	Y7	0,856
	Y8	0,714
	Y9	0,749
	Y10	0,873
	Y11	0,819
	Y12	0,736

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan uji loading factor pada Tabel 1, seluruh indikator pada variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), SIPD (Z), dan Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) memiliki nilai outer loading $>0,70$, sehingga dinyatakan valid dalam mengukur konstruk. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi syarat convergent validity dan layak digunakan dalam analisis SEM-PLS. Hasil ini juga menegaskan bahwa instrumen penelitian konsisten merepresentasikan konstruk teoritis, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan reliabel.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
SIPD (Z)	0,801	<i>Validity</i>
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,721	<i>Validity</i>
Akuntabilitas (X1)	0,851	<i>Validity</i>
Transparansi (X2)	0,811	<i>Validity</i>

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil uji Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan seluruh variabel laten memiliki nilai AVE $> 0,50$, yakni SIPD (0,801), Kinerja Pengelolaan Anggaran (0,721), Akuntabilitas (0,851), dan Transparansi (0,811). Hal ini membuktikan bahwa indikator mampu merefleksikan konstruk dengan baik, sehingga keempat variabel laten dinyatakan valid dan model penelitian memiliki konsistensi internal yang tinggi.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang stabil pada kondisi serupa. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability $\geq 0,7$, yang menunjukkan sebagian besar varians berasal dari konstruk yang diukur, bukan kesalahan. Reliabilitas yang baik penting untuk menjamin kualitas, kredibilitas, dan generalisasi hasil penelitian.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Akuntabilitas (X1)	0.877	0.852
Transparansi (X2)	0.785	0.774
Kinerja pengelolaan Anggaran (Y)	0.801	0.798
SiPD (Z)	0.854	0.848

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability $> 0,7$. Akuntabilitas (0,877; 0,852) memiliki reliabilitas tertinggi, diikuti SIPD (0,854; 0,848), Kinerja Pengelolaan Anggaran (0,801; 0,798), dan Transparansi (0,785; 0,774). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien Determinasi (*R-Square*) menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi, dengan nilai 0–1. Semakin tinggi *R-Square*, semakin baik kemampuan model menjelaskan data; misalnya *R-Square* 0,75 berarti 75% variasi dijelaskan model, sementara 25% dipengaruhi faktor lain. Dalam penelitian sosial-ekonomi, nilai 0,60–0,80 umumnya dianggap cukup baik.

Tabel 4. Uji *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
SIPD (Z)	0,778	0,754	Kuat
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,865	0,821	Kuat

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel SiPD (Z) memiliki *R Square* 0,778 dan Adjusted 0,754, sehingga 77,8% variasi dapat dijelaskan model dengan kategori “kuat”. Sementara itu, Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) memiliki *R Square* 0,865 dan Adjusted 0,821, yang berarti 86,5% variasinya dijelaskan model dengan kemampuan prediksi yang sangat baik. Kedua hasil ini menegaskan bahwa model penelitian memiliki explanatory power yang tinggi dan dapat diandalkan.

Pengujian Variabel Penelitian

Uji signifikansi pada SmartPLS dilakukan melalui metode bootstrapping untuk menilai apakah hubungan antarvariabel bermakna secara statistik atau hanya kebetulan. Hubungan dinyatakan signifikan jika *t-statistic* $> 1,96$ atau *p-value* $< 0,05$. Hasil pengujian divisualisasikan dalam diagram jalur dan tabel output, sehingga memudahkan peneliti melihat arah, kekuatan, dan kebermaknaan pengaruh antarvariabel, sekaligus menjadi dasar penerimaan atau penolakan hipotesis serta menilai keandalan model penelitian.

Tabel 5. Uji Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Akuntabilitas (X1) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,306	0,387	0,423	3,017	0,027
Transparansi (X2) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,365	0,594	0,439	2,147	0,041

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil analisis SmartPLS menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) ($\beta=0,306$; $t=3,017$; $p=0,027$), demikian pula Transparansi (X2) ($\beta=0,365$; $t=2,147$; $p=0,041$). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan

akuntabilitas dan transparansi berkontribusi langsung pada perbaikan kinerja pengelolaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana penerapan kedua aspek tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendorong kinerja yang lebih optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tabel 6. Uji Pengaruh Moderasi					
Model Pengaruh Moderasi	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SIPD (Z) x Akuntabilitas (X1) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,683	0,403	0,592	3,827	0,020
SIPD (Z) x Transparansi (X2) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,542	0,266	0,558	2,738	0,033

Sumber: Data Diolah SmartPLS 2025

Tabel uji moderasi menunjukkan bahwa SiPD berperan signifikan sebagai moderator dalam hubungan Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y). Interaksi SiPD x Akuntabilitas menghasilkan koefisien 0,683 (t=3,827; p=0,020), sedangkan interaksi SiPD x Transparansi sebesar 0,542 (t=2,738; p=0,033). Hasil ini membuktikan bahwa implementasi SiPD memperkuat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran, dengan penguatan lebih besar pada akuntabilitas.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,027 < 0,05$ dan koefisien jalur (original sample) sebesar 0,492 mengindikasikan arah hubungan yang positif, dimana besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran adalah sebesar 49,2%. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dapat diwujudkan. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang menekankan bahwa pejabat publik (steward) secara inheren memiliki motivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik sumber daya, yaitu masyarakat. Akuntabilitas mencerminkan komitmen moral dan profesional aparat pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik (Vidyasari & Suryono, 2021). Hal ini berarti setiap pejabat atau unit kerja harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan terkait penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan realisasi dana. Ketika akuntabilitas ditegakkan melalui pelaporan yang transparan, evaluasi berkala, serta penggunaan dana sesuai aturan dan prioritas pembangunan, maka setiap proses pengelolaan anggaran akan lebih sistematis dan terukur (Aulia et al., 2024). Dengan demikian, perencanaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran karena berdasarkan kebutuhan nyata, pelaksanaan lebih efisien karena mengurangi pemborosan atau duplikasi, dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif oleh pihak internal maupun publik. Secara keseluruhan, akuntabilitas yang kuat menjamin bahwa anggaran publik digunakan secara optimal, meminimalkan risiko penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas

tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai strategi penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan hasil nyata dari program pembangunan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan studi terdahulu, seperti Edowaty (2021), Suryani & Hidayat (2023), Azizah & Hidayat (2023), serta Binawati & Badriyah (2022), yang menegaskan bahwa akuntabilitas berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Akuntabilitas mendorong pejabat publik untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan, sehingga publik dapat mengawasi secara optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah meningkat. Dengan demikian, akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,041 < 0,05$ serta koefisien jalur (original sample) sebesar 0,301 yang berarti pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran mencapai 30,1%. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja yang dihasilkan, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun akuntabilitas. Sebaliknya, rendahnya transparansi dapat melemahkan pengawasan publik, membuka peluang terjadinya penyimpangan, serta menurunkan efektivitas kinerja. Transparansi bukan hanya sebatas memenuhi prinsip good governance, tetapi juga menjadi faktor kunci yang menjamin pengelolaan anggaran berjalan optimal dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi informasi terbukti meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran, baik melalui pemahaman alur perencanaan maupun partisipasi dalam pengawasan. Keterbukaan akses informasi membuat masyarakat lebih mudah memperoleh data mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran, termasuk melalui platform digital. Akses ini memperkuat mekanisme kontrol sosial, mendorong penggunaan dana yang lebih efisien, dan menekan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi juga menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat yakin bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, transparansi berfungsi ganda: sebagai sarana informasi sekaligus instrumen kontrol sosial yang memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Utami & Haryati (2023), Sumanto (2021), Saraswati & Suhartini (2022), serta Dewi & Hadiprajitno (2023), yang menyatakan bahwa transparansi memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Transparansi mendorong pemerintah untuk menyusun anggaran yang realistis, membuka akses informasi yang jelas, serta menyampaikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Kondisi ini memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara optimal, akuntabilitas publik ditegakkan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan integritas birokrasi, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dimoderasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memoderasi hubungan antara Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Anggaran secara positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,020 < 0,05$ serta koefisien jalur (original sample) sebesar 0,094. Temuan ini

menegaskan bahwa keberadaan SIPD mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran sebesar 9,4%. Artinya, ketika pemanfaatan SIPD dilakukan secara optimal, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran akan semakin meningkat. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pilar strategis yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran agar lebih transparan, terstruktur, dan real-time. Dengan demikian, keberadaan SIPD memperkuat mekanisme pengawasan, meminimalisir potensi penyimpangan, dan mendorong birokrasi bekerja lebih efisien serta bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan mengenai moderasi SIPD secara langsung menjawab permasalahan terkait belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023. Ketidakkonsistenan tersebut seringkali mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa SIPD memiliki peran signifikan dalam memperkuat konsistensi tersebut, karena sistem ini memungkinkan keterlacakan setiap tahapan perencanaan hingga realisasi anggaran, serta memberikan data real-time yang terdokumentasi secara sistematis. Dengan pemanfaatan SIPD yang lebih optimal, kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan dapat dikurangi, sekaligus memperkuat fungsi koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan anggaran memerlukan akuntabilitas yang ditopang oleh teknologi informasi yang adaptif seperti SIPD. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai sarana transparansi publik yang memperkuat legitimasi tata kelola keuangan daerah. Melalui keterbukaan data, masyarakat dapat mengakses informasi terkait alokasi, pelaksanaan, hingga hasil pengelolaan anggaran, sehingga tercipta ruang partisipasi aktif dalam pengawasan. Partisipasi publik ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, SIPD menjadikan akuntabilitas bukan hanya sebatas konsep normatif, tetapi implementasi nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu (Novrianti & Cahyaningdyah, 2022; Saraswati & Suhartini, 2022; Utami & Haryati, 2023; Afriyanto & Sunardi, 2024; Suryani & Hidayat, 2023), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diperkuat dengan dukungan sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan anggaran sektor publik.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dimoderasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa SIPD memoderasi hubungan antara Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Anggaran secara positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,033 < 0,05$ dan koefisien jalur (original sample) sebesar 0,096. Temuan ini mengindikasikan bahwa SIPD mampu memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sebesar 9,6%. Artinya, semakin baik integrasi transparansi dengan penggunaan SIPD, maka semakin efektif pula kinerja pengelolaan anggaran yang dapat diwujudkan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sendiri merupakan aspek fundamental yang menuntut agar informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan daerah dapat diakses, dipahami, serta diawasi oleh publik maupun pemangku kepentingan. Dengan dukungan SIPD, proses ini tidak hanya menjadi lebih terbuka, tetapi juga terdokumentasi secara sistematis, real-time, dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut secara langsung menjawab permasalahan terkait kurangnya transparansi serta belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023. Keterlambatan laporan keuangan, ketidaksesuaian data, maupun lemahnya akses informasi antarunit kerja menjadi cerminan dari

kurangnya transparansi. Dengan adanya SIPD, hambatan tersebut dapat diatasi melalui penyajian data yang lebih terintegrasi, konsisten, dan mudah diakses lintas OPD. Hal ini memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan dengan lebih terbuka, tepat waktu, dan sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, transparansi yang dimoderasi oleh SIPD tidak hanya meningkatkan akurasi informasi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dan memperkuat koordinasi antarunit kerja, sehingga menghasilkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, moderasi SIPD terhadap transparansi menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Melalui keterbukaan informasi anggaran, masyarakat dapat mengetahui dan menilai perencanaan, alokasi, serta realisasi anggaran, sementara SIPD memastikan bahwa data tersebut disajikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat pengawasan publik, meminimalisir penyalahgunaan anggaran, sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Kepercayaan publik yang tumbuh dari transparansi berbasis SIPD menjadi modal sosial penting yang mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Saraswati & Suhartini (2022), Utami & Haryati (2023), Afriyanto & Sunardi (2024), serta Suryani & Hidayat (2023), yang menegaskan bahwa transparansi berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, dan akan semakin kuat ketika didukung oleh sistem informasi yang andal seperti SIPD. Dengan demikian, transparansi yang tinggi, dimoderasi oleh SIPD, terbukti mampu memperkuat kinerja pengelolaan anggaran secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, sehingga setiap peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja tersebut. Transparansi juga terbukti berpengaruh signifikan positif, yang berarti semakin tinggi transparansi maka semakin baik kinerja pengelolaan anggaran. Selain itu, SIPD berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh akuntabilitas maupun transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran, sehingga keberadaannya mampu memperkuat hubungan antarvariabel. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance melalui akuntabilitas dan transparansi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai dasar dalam memperkuat kebijakan tata kelola anggaran yang berbasis digital melalui implementasi SIPD. Dengan adanya dukungan sistem informasi yang terintegrasi, proses penganggaran tidak hanya lebih akurat dan transparan, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.

REFERENSI

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036-4043.
- Amin, M. R., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), 183-193.

- Arifani, C., Agustinus Salle, yahoocoid, & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–82.
- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79-86.
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). Metode penelitian kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32-49.
- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journal of Student Research*, 1(2), 155-175.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah di kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.
- Dewi, B. S., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- Fernanda, J. W., Luthifiana, V., & Akhyar, M. K. (2022). Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk Pemodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS). *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika*, 15(2), 292–297.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002-1009.
- Irfan., Saprinan Manulang., & Syafrida Hani., (2024). Metodologi Penelitian Bisnis dan Konsep Aplikasi. Medan: Umsu Press.
- Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). Manajemen Belanja Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Lubis, R. Y., Zainuddin, & Rumina, C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020. *Serambi Konstruktivis*, 1(12), 2439–2450.
- Manoe, D. S., Koten, Y. P., & Rozady, M. P. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SIPD dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan : Pentingnya Kompetensi SDM. 22(4), 465–479
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Human Falah*, 3(1), 93-112.

- Novrianti, D., Rusdarti, R., & Cahyaningdyah, D. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Unit Kerja Universitas Negeri Semarang. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 121-133.
- Saraswati, N. P. A., & Suhartini, D. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 459.
- Sholiha, E. U. N., & Salamah, M. (2015). Structural Equation Modeling-Partial Least Square untuk Pemodelan Derajat Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur 2013). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 169-174.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Sumanto, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kota Jambi Dan Provinsi Jambi) (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 228-247.
- Swandewi, K. D., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 1132-1143.
- Utami, H. R., & Haryati, T. (2023). Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi. *Jambura Economic Education Journal*, 5(2), 100-111.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Yulita, R., Apriani, N., & Dewi Fitriyaningsih, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6(No. 12), 1975-1982.